

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Asikin, Zainal., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Ahmadi, Wiratni, *Sinkronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah dengan KebijakanPertanahan di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2006.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2011.
- Direktorat Penilai Tanah, *Standar Operasional Prosedur Internal*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah Kemerterian dan Tata Ruang BPN, 2020.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-11, Yogyakarta, Gadjahmada University Press, 2011.
- Hamid Yusuf, M, *Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilai Indonesia*, Edisi VII, Jakarta, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), 2018.
- Ilyas, Wirawan B., dan Burton, Richard., *Hukum Pajak*, Edisi 4, Jakarta, Salemba Empat, 2008.
- Kansil, Cst, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2009.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Edisi kelima, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2011.
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, Ind-hill-co, 1992.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta, Andi, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Prenada Media Group, 2016.

- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum*, Edisi Kelima Cetakan Pertama, Yogyakarta, Liberty, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno., *Teori Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pusaka, 2011.
- Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Unram Press, 2020.
- Mukti, Fajar dan Yulianto, Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pelajar Pustaka, 2010.
- Mustofa, Bachan., *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan* Jakarta, Granit, 2005.
- Resmi, Siti., *Perpajakan – Teori dan Kasus*, Edisi 10, Buku 1, Jakarta, Salemba Empat, 2017.
- Sari, Diana., *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung, PT Refika Aditama, 2012.
- Siahaan, Marihot Pahala., *Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT. Revika Aditama, 2006.
- Soekanto, Soejono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati., *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007.
- Suandy, Erly., *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat, 2002.
- Sukanto, Sarjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2013.
- Suprianto, Edy., *Hukum Pajak Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014.
- Sutedi, Adrian., *Hukum Pajak*, Jakarta, Sinar Grafika offset, 2011.
- Syafa'at, Rachmad, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Malang, Surya Pena Gemilang, 2011.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Termasuk Lembaran-Negara Nomor 104 Tahun 1960).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1458).

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985).

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 05).

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 05).

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 13).

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Nilai dasar Tanah dan Bangunan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 43).

C. Jurnal

Igir, Angreime, 2017, “Pembatalan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Lex Privatum* , Volume 5, No. 3 (Mei 2017) : hlm; 60.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexprivatum/search/authors/view?firstName=Angreime&middleName=&lastName=Igir&affiliation=&country=ID>

Novita Amelia, Sawitri Subiyanto, Arman Putra Wijaya, “ Pemetaan Zona Nilai Tanah Untuk Menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Menggunakan sistem Informasi Geografis Di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang”, *Jurnal Geodesi Undip*, Volume 4, Nomor 1(Januari 2015) : Hlm:139.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/7650/7410>

D. Internet

Akses Pencarian Penulisan Karya Ilmiah di Universitas Gadjah Mada
<http://etd.repository.ugm.ac.id>.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH BPK RI, Pencarian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, <https://peraturan.bpk.go.id/>, (diakses 28 September 2023).

E. Skripsi, Tesis, dan/atau Disertasi

Herlandina, Dheninia Audri “Praktik Penetapan besaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) terutang oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum di Bidang Perpajakan”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.

Putri, Happy Vistadhylia “Validasi BPHTB terhadap Penetapan Nilai Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan Berdasarkan Kesepakatan Penjual pembeli di Kota Denpasar dan Kaitannya dengan Asas Pacta sunt Servanda”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.

Putranto, Nicolaus Bryan Ready “Pelaksanaan dan Parameter Penetapan Nilai BPHTB atas Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kabupaten Klaten (Studi Implementasi Penetapan BPHTB ditinjau dari Perspektif Ketidakpastian Hukum (kursif) dan Keadilan Substantif)”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021.